

# **BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI**

## **Laporan Keuangan**

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2014

Jalan By Pass Ngurah Rai Pesanggaran, Denpasar, Bali  
Telephone (0361) 720498, faximilie (0361) 720498

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian Instansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Denpasar, 30 Juni 2015  
Kepala Balai,

Ir. A.A. Ngurah Bagus Kamandalu, M.Si  
NIP. 19591013 198703 1 002

	<b>Hal</b>
Kata Pengantar	i
Ringkasan	1
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Ringkasan Laporan Keuangan	1
IV. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
A.1. Dasar Hukum	7
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis	7
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	9
A.4. Kebijakan Akuntansi	9
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	17
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	17
B.2. Belanja Negara	18
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	23
C.1. Aset Lancar	23
C.2. Aset Tetap	24
C.3. Aset Lainnya	28
C.4. Kewajiban Jangka Pendek	29
C.5. Ekuitas Dana Lancar	29
C.6. Ekuitas Dana Investasi	30
D. Pengungkapan Penting Lainnya	30
D.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	30
D.2. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK	30
D.3. Informasi Pendapatan dan Belanja Akrual	31
D.4. Rekening Pemerintah	31
D.5. Pengungkapan Lain-lain	31
Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual	

		<b>Hal</b>
Tabel 1	: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan 2013	1
Tabel 2	: Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2014 dan 2013	3
Tabel 3	: Penggolongan Kualitas Piutang	14
Tabel 4	: Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	16
Tabel 5	: Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	17
Tabel 6	: Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2013 dan 2012	18
Tabel 7	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014	19
Tabel 8	: Perbandingan Realisasi Belanja TA 2014 dan 2013	20
Tabel 9	: Perbandingan Belanja Pegawai TA 2014 dan TA 2013	21
Tabel 10	: Perbandingan Belanja Barang TA 2014 dan TA 2013	22
Tabel 11	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan 2013	22
Tabel 12	: Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas	23
Tabel 13	: Rincian Persediaan	24
Tabel 14	: Rincian Aset Tetap	25
Tabel 15	: Nilai dan Perhitungan Penyusutan dan Akumulasi Peralatan dan Mesin	25
Tabel 16	: Nilai dan Perhitungan Penyusutan dan Akumulasi Gedung dan Bangunan	26
Tabel 17	: Nilai dan Perhitungan Penyusutan dan Akumulasi Jalan, Irigasi dan Jaringan	27
Tabel 18	: Nilai dan Perhitungan Penyusutan dan Akumulasi Aset Tetap Lainnya	28
Tabel 19	: Nilai dan Perhitungan Penyusutan dan Akumulasi Aset Lainnya	28
Tabel 20	: Rincian Aset Tak Berwujud	28
Tabel 21	: Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga	29

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali Semester II Tahun 2014 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2014 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 99.844.064,- atau mencapai 379.46,- persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 26.312.000,-

Realisasi Belanja Negara pada TA 2014 adalah sebesar Rp.11.830.473.081,- atau mencapai 98.77 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 11.977.492.000,-

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan 2013 dapat disajikan sebagai berikut:

*Tabel 1*  
*Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan 2013*  
*(dalam Rupiah)*

Uraian	2014			2013
	Anggaran	Realisasi	% Real. Thd Anggaran	Realisasi
<b>Pendapatan Negara</b>	26.312.000	99.844.064	379.46	106.610.706
<b>Belanja Negara</b>	11.977.492.000	11.830.473.081	98.77	12.036.986.015

## **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2014 dan 2013.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2014 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 22.911.078.431,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 8.802.000,-. Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 22.848.956.353,-. Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0,- dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 53.320.078,-.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 15.130.522,- yang terdiri dari hanya Kewajiban Jangka Pendek.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp. 22.895.947.909,- yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp. (6.328.522),- dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp. 22.902.276.431,-

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2  
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013  
(dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2014	31 Des 2013	Kenaikan / Penurunan	
			Rp	%
<b>ASET</b>				
Aset Lancar	8,802,000	39,585,912	(30,783,912)	-77.76
Aset Tetap	22,848,956,353	22,636,189,208	212,767,145	0.94
Piutang Jk Panjang	-	-	-	#DIV/0!
Aset Lainnya	53,320,078	47,670,078	5,650,000	11.85
<b>Jumlah Aset</b>	<b>22,911,078,431</b>	<b>22,723,445,198</b>	<b>187,633,233</b>	<b>0.83</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
Kewajiban Jk Pendek	15,130,522	10,060,947	5,069,575	50.39
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>15,130,522</b>	<b>10,060,947</b>	<b>5,069,575</b>	<b>50.39</b>
<b>EKUITAS DANA</b>				
Ekuitas Dana Lancar	(6,328,522)	29,524,965	(35,853,487)	-121.43
Ekuitas Dana Invesrasi	22,902,276,431	22,683,859,286	218,417,145	0.96
<b>Jumlah Ekuitas Dana</b>	<b>22,895,947,909</b>	<b>22,713,384,251</b>	<b>182,563,658</b>	<b>0.80</b>
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Ekuitas</b>	<b>22,911,078,431</b>	<b>22,723,445,198</b>	<b>187,633,233</b>	<b>0.83</b>

### 3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2014, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

# **BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI**

*JL. BY PASS NGURAH RAI PESANGGARAN, DENPASAR, BALI*

*TELEPON (0361) 720498, FAXIMILE (0361) 720498*

---

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Denpasar, 30 Juni 2015

Kepala Balai,

Ir. A.A. Ngurah Bagus Kamandalu, M.Si  
NIP. 19591013 198703 1 002



## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA. 2014		% thd Anng	TA. 2013
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
A. Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	26.312.000	99.813.349	379.35	106.610.706
<b>Jum Pendpt Negara &amp; Hibah</b>		<b>26.312.000</b>	<b>99.844.064</b>	<b>379.46</b>	<b>106.610.706</b>
B. Belanja Negara	B.2				
1. Belanja Pegawai	B.2.1.	5.585.518.000	5.581.815.568	99.93	5.233.927.035
2. Belanja Barang	B.2.2.	5.042.783.000	4.908.706.943	97.34	5.350.362.530
3. Belanja Modal	B.2.3.	796.000.000	786.790.285	98.84	826.850.500
4. Belanja Pinjaman dan Hibah	B.2.4.	553.191.000	553.160.285	99.99	625.845.950
<b>Jumlah Belanja Negara</b>		<b>11.977.492.000</b>	<b>11.830.473.081</b>	<b>98.77</b>	<b>12.036.986.015</b>

## II. NERACA

**BALAI PENKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI**  
**NERACA**  
**PER 30 Juni 2015 2014 DAN 2015**

( dalam Rp)

Uraian	Catatan	30 Juni 2015	31 Desember 2014
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>	C.1		
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.1	0	25.796.050
Piutang Bukan Pajak	C.1.2	0	7.927.500
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.3	0	(39.638)
Persediaan	C.1.4	8.802.000	5.902.000
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>8.802.000</b>	<b>39.585.912</b>
<b>ASET TETAP</b>	C.2		
Tanah	C.2.1	18.181.247.000	18.181.247.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	5.070.987.558	4.561.056.900
Gedung dan Bangunan	C.2.3	4.082.249.585	3.800.914.000
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.4	561.464.250	561.464.250
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	75.746.250	65.788.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6	(5.122.738.290)	(4.534.280.942)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>22.848.956.353</b>	<b>22.636.189.208</b>
<b>ASET LAINNYA</b>	C.3		
Aset Tak Berwujud	C.3.1	53.320.078	47.670.078
Aset Lain-lain	C.3.2	44.292.000	1.031.000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3	(44.292.000)	(1.031.000)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>53.320.078</b>	<b>47.670.078</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>22.911.078.431</b>	<b>22.723.445.198</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	C.4		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	15.130.522	10.060.947
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>15.130.522</b>	<b>10.060.947</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>15.130.522</b>	<b>10.060.947</b>
<b>EKUITAS DANA</b>			
<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>	C.5		
Cadangan Piutang	C.5.1	0	7.887.862
Cadangan Persediaan	C.5.2	8.802.000	5.902.000
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jk Pendek	C.5.3	(15.130.522)	(10.060.947)
Ekuitas Dana Lancar Lainnya	C.5.4	0	25.796.050
<b>Jumlah Ekuitas Dana Lancar</b>		<b>(6.328.522)</b>	<b>29.524.965</b>

Uraian	Catatan	30 Juni 2015	31 Desember 2014
<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>	C.6		
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	C.6.1	22.848.956.353	22.636.189.208
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	C.6.2	53.320.078	47.670.078
<b>Jumlah Ekuitas Dana Investasi</b>		<b>22.902.276.431</b>	<b>22.683.859.286</b>
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>		<b>22.895.947.909</b>	<b>22.713.384.251</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>		<b>22.911.078.431</b>	<b>22.723.445.198</b>

## IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### Dasar Hukum

#### A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 57/PB/ 2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

#### A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI

#### Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

BPTP Bali sebagai UPT pusat yang ada didaerah dilahirkan melalui SK Mentan No. 350 /Kpts/OT.210/6 /2001 tanggal 14 Juni 2001 yang dalam hubungan vertikal berada di bawah Badan Litbang Pertanian Pusat dan berlokasi di Propinsi Bali mempunyai tugas dan fungsi menciptakan terobosan-terobosan teknologi tepat guna spesifik lokasi yang mampu menjadi perekat kegiatan antar dinas terkait di wilayah. Perekat tersebut sekaligus menjembatani kebutuhan-kebutuhan teknologi di tingkat petani dan di tingkat pengambil kebijakan. Menyikapi sangat pentingnya peran BPTP di tingkat Propinsi maka dalam tahun 2005 telah dilakukan perubahan struktur organisasi untuk lebih mempertajam tugas pokok dan fungsi melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 301/Kpts/OT.140/7/2005 dimana BPTP menjadi binaan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) Bogor.

Berdasarkan Permentan tersebut maka BPTP di tingkat Propinsi dituntut untuk lebih berperan dalam menjembatani pengelolaan potensi sumberdaya local dengan basis penerapan teknologi local spesifik. Dalam mengelola sumberdaya pertanian maka peran teknologi adalah sangat vital dan memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan produksi, efisiensi dan pendapatan para petani. Sementara Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.16/Permentan/OT.140/3/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja BPTP, menetapkan tugas BPTP adalah melaksanakan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi. Hal ini berarti BPTP di daerah harus mampu melangkah cepat mengimbangi kebutuhan stakeholders akan inovasi teknologi pertanian. Dengan demikian sektor pertanian nantinya diharapkan mampu memberi kontribusi yang nyata pada kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan Visi Badan Litbang Pertanian 2010-2014, untuk menjadi lembaga penelitian dan pengembangan pertanian berkelas dunia dalam menghasilkan dan mengembangkan inovasi pertanian mendukung terwujudnya sistem pertanian industrial, maka visi BPTP Bali adalah *“Pada Tahun 2014 menjadi lembaga terdepan pengkajian dan pengembangan inovasi teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi di Bali bertaraf internasional”*

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang ditetapkan yaitu:

1. Menghasilkan, merekayasa dan mengembangkan teknologi inovasi pertanian tepat guna spesifik lokasi serta rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian di Bali sesuai dinamika kebutuhan masyarakat pertanian.
2. Mengembangkan jejaring kerjasama daerah, nasional dan internasional dalam rangka peningkatan kapasitas pengkajian, pendayagunaan hasil pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani
3. Meningkatkan efisiensi dan percepatan diseminasi teknologi inovasi pertanian kepada para pengguna serta meningkatkan penjangkaran umpan balik inovasi teknologi pertanian.
4. Mengembangkan kapasitas BPTP yang profesional dan mandiri.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

### **A.3.PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Tahun 2014 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

### **A.4 Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2013 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali adalah sebagai berikut:

*Kebijakan  
Akuntansi atas  
Pendapatan*

#### **(1) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan**

- Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah

nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatandisajikan menurutklasifikasi sumber pendapatan.

*Kebijakan  
Akuntansi atas  
Belanja*

## **(2) Kebijakan Akuntansi atas Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

*Kebijakan  
Akuntansi atas  
Aset*

## **(3) Kebijakan Akuntansi atas Aset**

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar*

### **a. Aset Lancar**

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan

menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### *Aset Tetap*

#### **Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama



dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

*Piutang Jangka Panjang*

### **Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

*Aset Lainnya*

### **Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya

adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

*Kebijakan  
Akuntansi atas  
Kewajiban*

#### **(4) Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

##### **a. Kewajiban Jangka Pendek**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

##### **b. Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Kebijakan  
Akuntansi atas  
Ekuitas Dana*

#### **(5) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana**

- Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan *kewajiban* pemerintah.

- Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.
- Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek.
- Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

Kebijakan  
Akuntansi atas  
Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih

#### (6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih .

Tabel 3  
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian		Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo		0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan		10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan		50%
Macet	1.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2.	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

Kebijakan  
Akuntansi atas  
Penyusutan  
Aset Tetap

### (7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

- Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 4.

Tabel 4  
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi  
Pendapatan Negara  
dan Hibah Rp.  
99.844.064,-

### B.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp. 99.844.064,- atau mencapai 379.46 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 26.312.000,-. Pendapatan Negara dan Hibah Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali terdiri dari Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan dan Pendapatan Jasa Lainnya.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya dapat dilihat dalam Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5  
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2014		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg
1. Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan	-	60.278.750	0
2. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	23.312.000	13.312,200	57.10
3. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (jasa giro)	3.000.000	0	0
4. Pendapatan Jasa Lainnya	0	10.350.000	0
5. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	0	13.681.983	0
6. Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Negara (masuk TP/TGR) bendahara		1.820.000	0
7. Pendapatan anggaran lain-lain	0	370.046	0
8. Pendapatan hibah luar negeri-langsung bentuk uang muka multilateral	0	31.085	0
	<b>26.312.000</b>	<b>99.844.064</b>	<b>379.46</b>

Berdasarkan Tabel 6 Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2014 dan 2013 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dari PNB pada TA 2014 mengalami penurunan sebesar 6.78 persen dari realisasi pendapatan dari PNB TA 2013.

Hal ini disebabkan antara lain disebabkan menurunnya Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan yang dikelola oleh BPTP Bali berupa kegiatan perbenihan padi sebesar 32,71 persen. Pada akun lain terjadi peningkatan penerimaan seperti pada :

1. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL, berupa pengembalian kelebihan tunjangan fungsional peneliti;

2. Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL, berupa pengembalian selisih saldo kas dari dana hibah.
3. Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara (TGR) dari kegiatan pengadaan belanja modal peralatan dan mesin pertanian.

*Tabel 6*  
*Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2014 dan 2013*

Uraian	Realisasi TA. 2014	Realisasi TA. 2013	Naik (turun) %
1. Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan	60,278,750	79,997,500	(32.71)
2. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	13,312,200	13,312,200	-
3. Pendapatan Jasa Lainnya	10,350,000	3,800,000	63.29
4. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	13,681,983	9,500,501	30.56
5. Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	0	505	(100.00)
6. Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara (masuk TP/TGR) bendahara	1,820,000	0	100.00
7. Pendapatan Anggaran Lain-lain	370,046	0	100.00
8. Pendapatan hibah luar negeri-langsung bentuk uang multilateral	31,085	0	100.00
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>99,844,064</b>	<b>106,610,706</b>	<b>(6.78)</b>

## B.2. Belanja Negara

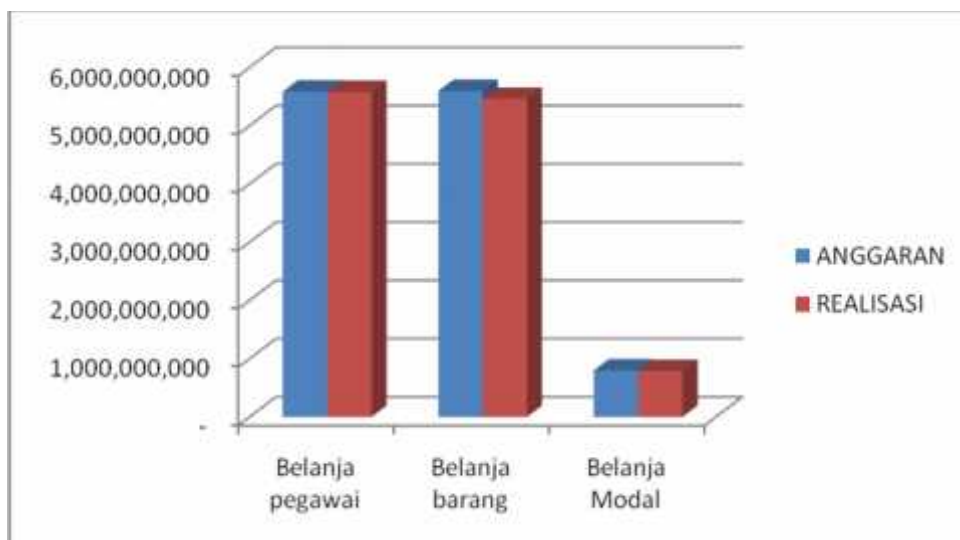
*Realisasi Belanja Negara Rp. 11,830,473,081*

Realisasi belanja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Semester II pada TA 2014 adalah sebesar Rp. 11,830,473,081 atau 98.77 persen dari anggaran senilai Rp. 12.977.492.000,-. Rincian Anggaran dan realisasi belanja TA 2014 tersaji pada Tabel 7.

Tabel 7  
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja pegawai	5,585,518,000	5,581,815,568	99.93
Belanja barang	5,595,974,000	5,461,867,228	97.60
Belanja Modal	796,000,000	786,790,285	98.84
Total Belanja Kotor	11,977,492,000	11,830,473,081	98.77
Pengembalian Belanja		-	
Belanja Netto	11,977,492,000	11,830,473,081	98.77

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Berdasarkan Tabel 8 Perbandingan Realisasi Belanja (Bersih) TA 2014 dan TA 2013 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada TA 2014 mengalami penurunan sebesar 6.80 persen dibandingkan realisasi belanja pada TA 2013.

Hal ini disebabkan antara lain:

1. Secara umum anggaran 2014 lebih rendah dari anggaran 2013
2. Penurunan terjadi pada belanja barang dan belanja modal sedangkan pada belanja pegawai terjadi peningkatan realisasi disebabkan kenaikan gaji dan tunjangan lainnya.



Tabel 8  
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2014 dan 2013

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA. 2014	REALISASI TA. 2013	%
Belanja pegawai	5,581,815,568	5,233,927,035	6.65
Belanja barang	5,461,867,228	5,976,208,480	-8.61
Belanja Modal	786,790,285	826,850,500	-4.84
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>11,830,473,081</b>	<b>12,036,986,015</b>	<b>-6.80</b>

Belanja Pegawai  
Rp 5,581,815,568

### B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali Semester II pada TA 2014 meliputi: Belanja Gaji Pokok PNS, Belanja Pembulatan Gaji PNS, Belanja Tunjangan Suami/Istri, Belanja Tunjangan Anak, Belanja Tunjangan Struktural PNS, Belanja Tunjangan Fungsional PNS, Belanja Tunjangan PPh PNS, Belanja Tunjangan Beras PNS, Belanja Uang Makan PNS, Belanja Uang Lembur dan Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan).

Realisasi Belanja Pegawai TA 2014 dan TA 2013 adalah masing-masing sebesar Rp. 5,581,815,568 dan Rp. 5.233.927.035. Berdasarkan Tabel 9, realisasi belanja TA 2014 mengalami kenaikan sebesar 6,65 persen dari realisasi belanja TA 2013. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya kenaikan Belanja gaji pokok pegawai secara umum
2. Adanya kenaikan Belanja Tunjangan Fungsional peneliti dan penyuluh pertanian.
3. Adanya Kenaikan tunjangan lainnya meliputi tunjangan suami/istri, tunjangan anak maupun tunjangan beras.

Tabel 9  
Perbandingan Belanja Pegawai TA 2014 dan TA 2013

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2014	REALISASI T.A. 2013	Naik (Turun) %
Belanja Gaji Pokok PNS	3,486,306,116	3,299,331,500	5.67
Belanja Pembulatan Gaji PNS	68,015	65,293	4.17
Belanja Tunjangan Suami/Istri	272,487,900	257,239,440	5.93
Belanja Tunjangan Anak	88,642,316	79,977,594	10.83
Belanja Tunjangan Struktural PNS	16,380,000	16,380,000	-
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	817,900,000	739,545,000	10.60
Belanja Tunjangan PPh PNS	116,966,461	102,227,695	14.42
Belanja Tunjangan Beras PNS	235,509,760	228,671,440	2.99
Belanja Uang Makan PNS	404,746,000	369,480,000	9.54
Belanja Tunjangan Umum PNS	116,620,000	124,835,000	(6.58)
Belanja Uang Lembur	26,189,000	27,243,000	(3.87)
Belanja Pegawai Transito		-	-
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)		-	#DIV/0!
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>5,581,815,568</b>	<b>5,244,995,962</b>	<b>6.42</b>
Pengembalian Belanja Pegawai		11,068,927	(100.00)
<b>Jumlah Belanja Bersih</b>	<b>5,581,815,568</b>	<b>5,233,927,035</b>	<b>6.65</b>

Belanja Barang  
Rp 5,461,867,228

### B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2014 dan TA 2013 adalah masing-masing sebesar Rp. 5,461,867,228 dan Rp. 5,976,208,480,-

Berdasarkan Tabel 10, Realisasi Belanja Barang TA 2014 mengalami penurunan 8.606 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2013. Hal ini disebabkan antara lain adanya penghematan anggaran untuk kegiatan melalui revisi pengurangan pagu anggaran dan efisiensi dalam pelaksanaan perjalanan dinas pegawai.

Tabel 10  
Perbandingan Belanja Barang TA 2014 dan TA 2013

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA. 2014	REALISASI TA. 2013	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	<b>278,386,750</b>	264,651,600	5.190
Belanja Barang Non Operasional	<b>2,340,018,935</b>	2,867,461,230	-18.394
Belanja Jasa	<b>263,438,807</b>	263,546,612	-0.041
Belanja Pemeliharaan	<b>360,629,831</b>	379,829,738	-5.055
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	<b>2,219,392,905</b>	2,200,719,300	0.849
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>5,461,867,228</b>	<b>5,976,208,480</b>	<b>-8.606</b>
Pengembalian Belanja		-	0.000
<b>Jumlah Belanja Bersih</b>	<b>5,461,867,228</b>	<b>5,976,208,480</b>	<b>-8.606</b>

Belanja Modal  
Rp 786.790.285,-

### B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan TA 2013 adalah masing-masing sebesar Rp. 786.790.285,- dan Rp. 826,850,500,-

Berdasarkan Tabel 11, Realisasi Belanja Modal TA 2014 mengalami penurunan sebesar 4,84 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2013. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Secara umum anggaran untuk belanja modal memang lebih rendah dari TA. 2013.
2. Hanya ada dua jenis pengadaan yang bersifat menambah nilai gedung bangunan dan berupa peralatan dan mesin pertanian untuk menunjang Tupoksi Balai..

Tabel 11  
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan 2013

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA. 2014	REALISASI TA. 2013	Naik (Turun) %
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	281,335,585	149,500,000	100.00
Belanja modal Peralatan dan Mesin	505,454,700	532,095,000	-5.01
Belanja Modal Lainnya		29,743,000	100.00
Belanja Modal Jaringan		115,512,500	100.00
Belanja Modal Fisik Lainnya			100.00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>786,790,285</b>	<b>826,850,500</b>	<b>-4.84</b>
Pengembalian Belanja		-	0.00
<b>Jumlah Belanja Bersih</b>	<b>786,790,285</b>	<b>826,850,500</b>	<b>-4.84</b>

Belanja Pinjaman  
dan Hibah  
Rp 553.191.000,-

#### **B.2.4. Belanja Pinjaman dan Hibah**

Alokasi untuk Belanja Pinjaman dan Hibah pada Tahun 2014 sebesar Rp. 553.191.000,- yang terdiri dari sisa saldo tahun 2013 sebesar Rp. 25.796.050,- dan hibah langsung tahun 2014 sebesar Rp. 527.395.320,-. Pada akhir tahun 2014 terealisasi sebesar Rp. 553.160.285,- dengan sisa saldo akhir sebesar Rp. 31.085,- terdiri dari sisa belanja tidak terealisasi sebesar Rp. 30.715,- dan selisih kurs rupiah sebesar Rp. 370,- yang sudah disetor ke kas Negara.

## C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

### C.1. Aset Lancar

#### C.1.1 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 25.796.050,- yang merupakan kas berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

Tabel 12  
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

No.	Keterangan	Jumlah
1	Dana hibah 2014	Rp 553,191,000
2	Pajak PPh yang Belum Disetor	Rp -
3	Pengembalian Belanja belum disetor ke kas negara	Rp -
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 553,191,000</b>

Jumlah tersebut di atas merupakan dana hibah kegiatan AVRDC.

Kas Lainnya dan Setara  
Kas Rp. 0,-

Piutang Bukan Pajak Rp.  
0,-

#### C.1.2 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 7.887.862,- Piutang Bukan Pajak ini merupakan penjualan benih hasil perbanyakkan kegiatan UPBS yang masih berada di tingkat petani yang terdiri dari Inpari 6 Kelas Benih FS 150 kg @ Rp. 7.000,- = Rp. 1.050.000,- , Inpari 7 Kelas Benih ES 211 kg @ Rp. 7.000,- = Rp. 1.477.000 dan Ciherang Kelas Benih SS 771.5 @ Rp. 7.000,- = Rp. 5.400.500,-. Piutang tersebut telah disetorkan ke kas negara melalui SSBP sebesar Rp. 7.927.500,- dengan penyisihan sebesar Rp. (39.638,-) tertanggal 11 April 2014.

Penyisihan Piutang Tak  
Tertagih – Piutang Bukan  
Pajak Rp 0

#### C.1.3 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. (39.638).

Persediaan Rp.  
8.802.000,-

#### C.1.4 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing adalah sebesar Rp 8.802.000,- dan Rp 5.902.000,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Barang konsumsi sebesar Rp. 558.000,- berupa alat tulis kantor dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp. 4.067.000,- berupa stok benih padi yang

akan diserahkan kepada masyarakat pada awal musim tanam yang jatuh pada bulan Pebruari 2015.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 13  
Rincian Persediaan

URAIAN	2014	2013
Barang Konsumsi	558.000	458.000
Hewan dan Tanaman utk dijual atau diserahkan kpd masyarakat	4.067.000	1.267.000
Suku Cadang	4.177.000	4.177.000
Bahan Baku		
Persediaan Lainnya		
<b>JUMLAH</b>	<b>8.802.000</b>	<b>5.902.000</b>

Mutasi Persediaan per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2013</b>	<b>Rp 5,902,000</b>
Mutasi masuk:	
- pembelian	Rp 2,900,000
Mutasi keluar:	
- Habis pakai	Rp -
<b>Saldo per 31 Desember 2014</b>	<b>Rp 8,802,000</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap Rp.  
22.848.965.353-

## C.2 Aset Tetap

Saldo aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 22.848.956.353,- Dan Rp. 22.636.186.208,- yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Sedangkan nilai aset tetap pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp 22.848.956.363,-. Rincian Aset Tetap Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 14.  
Rincian Aset Tetap

No.	Uraian	31-Dec-14	31-Dec-13
1	Tanah	Rp 18,181,247,000	Rp 18,181,247,000
2	Peralatan dan Mesin	Rp 5,070,987,558	Rp 4,561,056,900
3	Gedung dan Bangunan	Rp 4,082,249,585	Rp 3,800,914,000
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp 561,464,250	Rp 561,464,250
5	Aset Tetap Lainnya	Rp 75,746,250	Rp 65,788,000
6	KDP	Rp -	Rp -
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 27,971,694,643</b>	<b>Rp 27,170,470,150</b>
Akumulasi Penyusutan		Rp (5,122,738,290)	Rp (4,534,280,942)
Nilai Buku Aset Tetap		Rp 22,848,956,353	Rp 22,636,189,208

Tanah

Rp18.181.247.000,-

**C.2.1 Tanah**

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor BPTP Bali per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp. 18.181.247.000.- seluas 13.832 m2 dengan nomor sertifikat AF 389646, 22.09.03.05.4.00022. Terdiri dari tanah perkantoran dan kompleks tempat tinggal di BPTP Bali di Jalan By Pass Ngurah Rai Pesanggaran Denpasar, tidak ada penambahan atau pengurangan nilai aset tanah.

Peralatan dan Mesin

Rp. 1.288.102.711,-

**C.2.2 Peralatan dan Mesin**

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah Rp. 5.070.987.558,- dan Rp. 4.561.056.900,- Sedangkan nilai buku peralatan dan mesin pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp. 1.288.102.711,-. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 15.  
Nilai dan Perhitungan Penyusutan dan Akumulasinya Peralatan dan Mesin

<b>Saldo per 31 Desember 2013</b>	<b>Rp 4,561,056,900</b>
Mutasi masuk:	
- pembelian	Rp 510,642,658
- hibah	Rp -
- reklasifikasi dari aset lainnya	Rp -
Mutasi keluar:	
- Penghentian aset dari penggunaan	Rp (712,000)
<b>Saldo per 31 Desember 2014</b>	<b>Rp 5,070,987,558</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2014	Rp (3,782,884,847)
Nilai Buku Per 31 Desember 2013	Rp 1,288,102,711

Transaksi penambahan peralatan dan mesin adalah berupa:

- a. Pembelian almari besi metal sebesar Rp. 16.455.666,- filling kabinet besi sebesar Rp. 7.560.000,- kursi besi metal sebesar Rp. 62.985.000,- sice sebesar Rp. 10.450.000,- meja rapat sebesar Rp. 122.165.000,- meja resepsionis sebesar Rp. 5.703.500,- meja makan kayu sebesar Rp. 3.520.000,- partisi sebesar Rp. 85.632.650,- AC Split sebesar Rp. 25.700.000,- podium sebesar Rp. 1.958.000,- karpet sebesar Rp. 42.834.000,- korden sebesar Rp. 9.543.600,- panggung sebesar Rp. 30.334.700,- tempat slide sebesar Rp. 935.000,- PC unit sebesar Rp. 47.066.208,- laptop sebesar Rp. 30.000.000,- printer sebesar Rp. 7.800.000,-
- b. Mutasi keluar penghentian aset dari penggunaannya berupa : White board sebesar Rp. 55.000,- dan meja kerja kayu sebesar Rp. 657.000,-,
- c. Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan dalam Tabel 15.

Gedung dan Bangunan  
Rp 2.871.530.377,-

### C.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah Rp. 4.082.249.585,- dan Rp. 3.800.914.000,- Sedangkan nilai buku Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp. 2.871.530.377,-. Mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Nilai dan Perhitungan Penyusutan dan Akumulasi Gedung dan Bangunan

<b>Saldo per 31 Desember 2013</b>	<b>Rp</b>	<b>3,800,914,000</b>
Mutasi tambah	Rp	281,335,585
Mutasi keluar:		
<b>Saldo per 31 Desember 2014</b>	<b>Rp</b>	<b>4,082,249,585</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2014	Rp	(1,210,719,208)
Nilai Buku Per 31 Desember 2013	Rp	2,871,530,377

Transaksi gedung dan bangunan berupa penambahan nilai gedung perpustakaan (ruang pertemuan besar dan lobby) sebesar Rp. 197.518.585,- dan renovasi rumah jabatan sebesar Rp. 83.817.000,-



Jalan, Irigasi dan Jaringan  
Rp. 432.330.015,-

### C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp. 561.464.250,-. Nilai buku Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp. 432.330.015,- yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp. (129.134.235,-). Tidak terjadi perubahan nilai terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki oleh Kantor Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali sampai dengan 31 Desember 2014. Perhitungan nilai penyusutan pada Tabel 17.

Tabel 17. Nilai dan Perhitungan Penyusutan dan Akumulasi Jalan , irigasi dan Jaringan

<b>Saldo per 31 Desember 2013</b>	<b>Rp</b>	<b>561,464,250</b>
Mutasi masuk:		
Mutasi keluar:		
<b>Saldo per 31 Desember 2014</b>	<b>Rp</b>	<b>561,464,250</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2014	Rp	(129,134,235)
Nilai Buku Per 31 Desember 2014	Rp	432,330,015

Aset Tetap Lainnya Rp. 75.746.250,-

### C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah Rp. 75.746.250,- dan Rp. 65.788.000,- yang merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Aset tetap lainnya tersebut adalah berupa buku, majalah dan literatur perpustakaan. Terjadi perubahan nilai akibat adanya pembelian terhadap Aset tetap lainnya berupa pembelian buku inovasi teknologi pertanian sebesar Rp. 9.958.250,-. Aset tetap lainnya pada tanggal pelaporan yaitu sebesar Rp. 75.746.250,-. Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Tabel 18.

Tabel 18. Nilai dan Perhitungan Penyusutan dan Akumulasi Aset Tetap Lainnya

<b>Saldo per 31 Desember 2013</b>	<b>Rp</b>	<b>65,788,000</b>
Mutasi masuk:		
- pembelian	Rp	9,958,250
- hibah	Rp	-
- reklasifikasi dari aset lainnya	Rp	-
Mutasi keluar:		
- Penghentian aset dari penggunaan	Rp	-
<b>Saldo per 31 Desember 2014</b>	<b>Rp</b>	<b>75,746,250</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2014	Rp	-
Nilai Buku Per 31 Desember 2014	Rp	75,746,250

Aset Lainnya Rp  
53.320.078,-

### C.3. Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah Rp. 53.320.078,- dan Rp 47.670.078,- yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Nilai buku Aset Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp. 53.320.078,- yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp. 44.292.000,-. Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Tabel 19.

Tabel 19. Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasi Aset lainnya

No.	Uraian	31-Dec-14	31-Dec-13
1	Aset Tak Berwujud	Rp 53,320,078	Rp 47,670,078
2	Aset Lain-Lain	Rp 44,292,000	Rp 1,031,000
	Nilai Perolehan	Rp 97,612,078	Rp 48,701,078
	Akumulasi Penyusutan	Rp (44,292,000)	Rp (1,031,000)
	Nilai Buku	Rp 53,320,078	Rp 47,670,078

Aset Tak Berwujud Rp  
53.320.078,-

#### C.3.1 Aset Tak Berwujud

Saldo nilai perolehan aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 Rp. 53.320.078,- dan Rp. 47.670.078,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada kantor BPTP Bali berupa software dan hak paten yang merupakan asset transfer masuk. Adapun rincian ATB per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 20  
Rincian Aset Tak Berwujud

No.	Uraian	31 Desember 2014
1	Intra Data Aplikasi Pelaporan Keuangan (SAI)	Rp 47,670,078
2.	Hak paten	Rp. 5.650.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 53.320.078</b>

Aset Lain-Lain Rp  
44.292.000,-

### C.3.2 Aset Lain-Lain

Aset lain-lain adalah merupakan barang milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional kantor BPTP Bali. Nilai perolehan aset lain-lain per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah Rp. 44.292.000,- dan Rp. 1.031.000,-. Sedangkan nilai buku aset Lain-lain pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp. 0,- Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

<b>Nilai perolehan per 31 Desember 2013</b>	<b>Rp 1,031,000</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
- reklasifikasi dari aset tetap	Rp 43,261,000
<b>Mutasi kurang:</b>	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	Rp -
- penghapusan BMN	Rp -
<b>Nilai perolehan per 31 Desember 2014</b>	<b>Rp 44,292,000</b>
Akm. Penyusutan	Rp (44,292,000)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2014</b>	<b>Rp -</b>

Kewajiban Jangka  
Pendek

### C.4. KEWAJIBAN

#### C.4. Kewajiban Jangka Pendek

##### C.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak  
Ketiga Rp. 15.130.522,-

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp 15.130.522,- dan Rp 10.060.947,- merupakan utang kepada pihak ketiga berupa tagihan rekening listrik, telephone dan PDAM untuk Bulan Desember 2014 yang pelunasannya di Bulan Januari 2014.

Tabel 21  
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Utang kepada Pihak ketiga lainnya	Rp15,130,522	Tagihan rekening listrik telephone dan PDAM Bulan Desember 2014
<b>Total</b>		<b>Rp15,130,522</b>	

### EKUITAS

Ekuitas Dana Lancar Rp  
19.467.528,-

#### C.5. Ekuitas Dana Lancar

##### C.5.1 Cadangan Piutang

Jumlah Cadangan Piutang per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 7.887.862,-

### **C.5.2 Cadangan Persediaan**

Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp 8.802.000,- dan Rp 5.902.000,- merupakan jumlah ekuitas dana lancar Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali dalam bentuk persediaan.

### **C.5.3 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek**

Jumlah Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar minus Rp 15.130.522,- dan minus Rp 10.060.947,-. Perkiraan tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek dan telah dibayarkan pada bulan Januari 2014.

### **C.5.4 Ekuitas Dana Lancar Lainnya**

Ekuitas dana lancar lainnya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp 25.796.050,- yang merupakan dana hibah/kerjasama dengan pihak AVRDC selama 4 tahun (2011 s/d 2014)

*Ekuitas Dana Investasi  
Rp 22.683.859.286,-*

## **C. 6. Ekuitas Dana Investasi**

### **C.6.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap**

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp 22.848.956.353,- dan Rp 22.636.189.208,- merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap.

### **C.6.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya**

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp. 53.320.078,- dan Rp. 47.670.078,- merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Aset Lainnya.

## **D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA**

### **D.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca

### **D.2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK**

Selama Tahun Anggaran 2014 tidak terdapat temuan atas pemeriksaan laporan

keuangan yang dilakukan oleh BPK

### **D.3 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL**

Daftar informasi pendapatan dan belanja akrual disajikan sebagaimana dalam lampiran.

### **D.4 REKENING PEMERINTAH**

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Kantor BPTP Bali Bank BPD Kantor Cabang Ngurah Rai Kuta Bali A/C 035 01.0000024-3 dan untuk rekening dana hibah A/C 035.01.0200081-4 a.n. Bendahara Pengeluaran Kantor BPTP Bali

### **D.5 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

1. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 5118/kpts/KU.410/12/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2013, adalah sebagai berikut:  
Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. AANB. Kamandalu, M.Si  
Bendahara Pengeluaran : I Putu Adi Purwanta, SE  
Bendahara Penerima : I Gusti Ayu Ngurah Astari  
Surat Keputusan KPA No. 02/Kpts/OT.160/I.12.16/2014 tentang Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM an. I Ketut Mahaputra, SP, MP.
2. Selain sumber dana BPTP Bali yang bersumber dari DIPA, BPTP Bali juga mengelola dana kerjasama penelitian berupa Pelaksanaan Program SMARTD berupa 6 kegiatan kajian, antara lain: 1). Peran Penyuluh dalam Mendukung Program Swasembada Daging Sapi Berkelanjutan di Bali dengan no kontrak 325.5/PL.220/I.1/3/2014k tgl 14 Maret 2014, 2). Introduksi Pengemasan pada Produk Olahan Tepung Komposit Keladi dan Ubi Jalar dengan no kontrak 325.6/PL.220/I.1/03/2014k tanggal 14 Maret 2014 3). Model Penggemukkan Sapi Bali di Daerah Sentra Pengembangan Jagung Manis di Kabupaten Klungkung dengan no kontrak 325.3/PL.220/I.1/03/2014k tanggal 14 Maret 2014, 4). Penyediaan Benih Hortikultura Berkelanjutan Melalui Pemberdayaan Penangkaran Benih dengan no kontrak 324.4/PL.220/I.1/03/2014k tanggal 14 Maret 2014, 5) MP3MI Berbasis Integrasi Hortikultura Sapi di Desa Pempatan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem dengan no kontrak 345.3/PL.220/I.1.04/2014k tanggal 21 April 2014, 6). Pengkajian Usahatani Integrasi Kedelai dengan Ternak dan Ikan dengan no kontrak 38/PL.220/I.1/02/2014k tanggal 25 Pebruari 2014. Rincian realisasi kegiatan

Program SMARTD disajikan sebagaimana terlampir.

3. Terkait audit reguler tim Inspektorat Jendral Kementerian Pertanian tahun 2014 ditemukan adanya kelebihan pembayaran tunjangan kinerja bagi petugas belajar jenjang S3 an : Suharyanto, SP, MP sebesar Rp. 17.347.503,18,- dan disepakati pengembalian dengan cara mengangsur dalam jangka waktu 2 tahun. Sampai akhir Desember 2014 sudah terealisasi sebesar Rp. 6.500.000,- jadi masih sisa Rp. 10.847.503,18,-

---

Kepala BPTP Bali

Ir. A.A. Ngurah Bagus Kamandalu, M.Si  
NIP. 19591013 198703 1 002